

**ANALISIS SWOT TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN
CHUSNUNIA CHALIM DAN ZAIFUL BOKHARI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2015**

Skripsi

Oleh

Dimas Surya Adi Pamungkas



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

ANALISIS SWOT TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN CHUSNUNIA CHALIM DAN ZAIFUL BOKHARI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015

Oleh

Dimas Surya Adi Pamungkas

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur diikuti oleh 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan nomor urut 1 yaitu Yusran Amirullah dan Sudarsono, sedangkan pasangan nomor urut 2 yaitu Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari. Pasangan Chusnunia Chalim-Zhaiful Bokhari ditetapkan menjadi pemenang pemilihan bupati 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari Analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori pemahaman analisis SWOT dan teori modalitas dalam kontestasi politik. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa modal sosial merupakan kekuatan paling dominan dan sangat penting dalam strategi memenangkan pemilihan kepala daerah. Selain itu, strategi SWOT yang digunakan oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful yaitu kekuatan (*strenght*) dari Chusnunia Chalim sebagai sosok yang memiliki sosialisasi dan berlatar belakang dari kalangan santri dan merupakan keturunan dari kiyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kelemahan (*weakness*) yang dialami oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful terletak pada indikator sosial bahwa masalah gender. Peluang (*Opportunities*) dari Pasangan Chusnunia-Zaiful yaitu memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan. Ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful adalah Pasangan Yusron-Amirullah sudah memiliki jaringan hingga ke tingkat desa, para kepala desa di beberapa kecamatan sudah siap mendukung pasangan tersebut untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Chusnunia-Zaiful, Strategi, Analisis SWOT

ABSTRACT

SWOT ANALYSIS OF VICTORY COUPLE CHUSNUNIA CHALIM AND ZAIFUL BOKHARI ON ELECTORAL DISTRICT HEAD EAST LAMPUNG 2015

By

Dimas Surya Adi Pamungkas

Local elections in East Lampung district followed by two pairs of candidates Regent and Vice Regent. Pair number 1 is Yusran Amirullah and Sudarsono, while the pair number 2 is Chusnunia Chalim and Zaiful Bokhari. Couple Chusnunia Chalim-Zhaiful Bokhari set to be the winner of regent elections of 2015. This study aims to determine how the strategy Chusnunia pair Chalim and Zaiful Bokhari in local elections in East Lampung district in 2015 in terms of SWOT analysis. This study uses qualitative descriptive method by using the theory of knowledge and theory analisis SWOT modalities of the political contest. Based on these results we concluded that social capital is the most dominant force, and very important in the strategy to win the elections. In addition, the SWOT strategy used by pair-Zaiful Chusnunia is kekuatan (Strenght) of Chusnunia Chalim as someone who has a background of socialization and among students and is a descendant of the Ulama one of the founders of the Nahdlatul Ulama. Kelemahan (Weakness) experienced by Chusnunia-Zaiful pair lies in the social indicators that gender issues. Peluang (Opprtunities) of Chusnunia-Zaiful pair of harnessing the support of civil society organizations (CBOs) in the field religious. Ancaman (Threats) faced by a pair Chusnunia-Zaiful is Yusron-Amirullah pair already has a network to the village level, village heads in some districts are ready to support the pair to win local elections.

Keywords: election, Chusnunia-Zaiful, Strategies, SWOT Analysis

**ANALISIS SWOT TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN
CHUSNUNIA CHALIM DAN ZAIFUL BOKHARI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2015**

Oleh

Dimas Surya Adi Pamungkas

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **ANALISIS SWOT TERHADAP KEMENANGAN PASANGAN CHUSNUNIA CHALIM DAN ZAIFUL BOKHARI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Dimas Surya Adi Pamungkas**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1116021030**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010198603 1 006

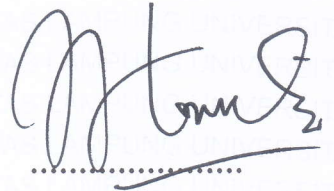
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si
NIP. 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Penguji Utama : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Desember 2016



Dimas Surya Adi Pamungkas
NPM. 1116021030

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Desember 1992, merupakan anak dari pasangan Bapak Dahroni dan Ibu Khotamah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kasih Ibu pada tahun 1999, dilanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pugung Raharjo pada tahun 2005, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pugung Raharjo pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Model Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri (UM).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi seperti Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI), Birohmah Unila, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan serta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Jurusan (LKMMTJ) pada tahun 2012. Penulis juga pernah mengikuti organisasi sosial non akademik seperti diamanatkan sebagai pengisi materi training motivasi di beberapa sekolah dan pelatihan pengembangan diri *Public Speaking Forbid*.

MOTTO

"Maka nikmat Tuhan-Mu yang mana lagi yang kamu dustakan?"

(Q.S. Ar-Rahman: 13)

"Laut yang tenang tidak akan menciptakan pelaut yang handal"

(Dimas Surya Adi Pamungkas)

**"Keberhasilan itu bukan dari siapa yang hebat dan kuat,
tapi tentang siapa yang bertahan hingga akhir"**

(Dimas Surya Adi Pamungkas)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

“Bapak dan Ibu tercinta”

Dahroni dan Khotamah

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan di setiap sujudnya, memberikan kasih sayang, dukungan, pelajaran hidup semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat dipersembahkan.

ALMAMATERKU “UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayat-Nya proses yang dijalani dalam pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis SWOT terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015” dapat berjalan dengan baik. Selesaiannya skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, solusi dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.Ip., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Staf akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Riyanti, Mas Bambang, Pakde Jumadi dan Pak Herman yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi dan perlengkapan seminar serta ujian.
9. Kedua orang-tuaku Bapak Dahroni dan Ibu Khotamah, kakakku Mas Rizal dan Mbak Lulu, Pamanku Om Toyib dan Bu Kartini, Om tohir, Puput yang telah mendoakan, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Aku selalu bersyukur memiliki keluarga seperti kalian dan ku tahu bahwa apapun dan berapapun yang akan kuberikan nanti, tidak akan pernah bisa cukup, lebih, dan terbalaskan, jika dibandingkan dengan apa yang telah kalian berikan

kepadaku dari dalam kandungan sampai kini dan nanti, *family are the best thing i've ever had.*

10. Jajaran Pegawai KPU Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
11. Narasumber dari KPU Kabupaten Lampung Timur, Tim Pemenang Pasangan Chusnunia-Zaiful, Petugas Panitia Pengawas Kecamatan Sekampung Udik, dan Tokoh Masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.
12. Teman-teman Kost *Istiqomah* Bang Fajar, Diki azhari, Danu Wahyudi, Gilas, Ribut, Rizalul, Yoga, Yopi, Yuda Puspito, Ojay dan teman-teman Kost *Al-fayat* Bang Andry, Bang Adi, Mbah Nur, Gede, Gilang yang telah memberikan banyak bantuan dan canda tawa selama ini.
13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 dan 2012, Asep, Azwin, Faisal, Imam, Kiki Syafdi, Rendra, Budi Santoso, Galih Ramadhan, Guntur Ardyan, Syaiful Zuhri, Yoga Swasono serta seluruh mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Agus, Ahmad, Dyah, Hendro, Indah, Irpan serta keluarga besar KKN Desa Sendang Rejo Kabupaten Lampung Tengah Keluarga besar Pak Broto dan Pak Bejo yang sudah penulis anggap sebagai keluarga baru.
15. Teman-teman Forbid dan Ex-Forbid, Pak Edi, Pak Eko, Pak Rohman, serta seluruh rekan yang tidak bisa saya sebutkan selama ini telah memberikan banyak ilmu dan pengembangan karakter di luar kehidupan kampus.

16. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.
17. TERIMA KASIH KALIAN BARISAN PARA MANTAN.

Bandar Lampung, 27 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Kegunaan Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Modalitas dalam Kontestasi Politik.....	14
1. Modal Politik	17
2. Modal Sosial	22
3. Modal Ekonomi	25
B. Konsepsi SWOT (<i>Strenght, Weakness, Oportunities,dan Treaths</i>)....	30
C. Konsep Pemilihan Umum.....	35
1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah	37
2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	39
D. Kerangka Pikir	42
III. METODE PENELETIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
D. Teknik Penentuan Informan	48
E. Jenis Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Pengolahan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data	54

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur.....	57
1. Orientasi Wilayah	57
2. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Timur.....	62
B. Profil Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari.....	66
1. Chusnunia Chalim.....	66
2. Zaiful Bokhari.....	79
C. Profil Pasangan Yusron Amirullah dan Yusron Sudarsono	71
1. Yusron Amirullah	71
2. Sudarsono.....	72
D. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015	73

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015	75
1. Kekuatan (<i>Strenght</i>).....	76
2. Kelemahan (<i>Weaknees</i>).....	82
3. Peluang (<i>Opportunities</i>).....	88
4. Ancaman (<i>Threats</i>)	92
B. Pembahasan	96
1. Strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari analisis Kekuatan (<i>Strenght</i>) dan Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	98
2. Strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari analisis Peluang (<i>Opportunities</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>)	101

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2015	3
2. Rekapitulasi data Hasil perolehan suara pemilihan Kepala Daaerah Kabupaten Lampung Timur 2015 tiap kecamatan	4
3. Penelitian terdahulu	10
4. Perspektif Ekonomi Politik Pilihan Publik, Didik J, Rachbini, 2002	27
5. Diagram matriks SWOT	32
6. Fokus penelitian dengan bentuk indikator dan sub-indikator kemenangan pasangan calon Chusnuia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015	47
7. Informan.....	49
8. Onder Distrik berdasarkan dari marga-marga.....	63
9. Hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2015	74
10. Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.....	87
11. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Chusnunia-Zaiful Periode 27 Agustus s/d 16 Oktober 2015.	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Dana Politik	29
2. Bagan Kerangka Pikir	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan proses perekrutan pejabat politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis tanpa melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2005 dan berlanjut sampai sekarang. Pemilihan kepala daerah dari tahun 2005 sampai tahun 2014 merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Sebagai dasar pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan pasal 201 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.”

Pilkada merupakan sarana demokrasi yang memiliki kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dengan daerah atau bahkan kepentingan nasional atau internasional yang telah digunakan disebagian besar negara termasuk Indonesia. Melalui pilkada memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pilkada merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, serta mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. (Suharizal, 2012: 15)

Pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015, diikuti beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari 6 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Way Kanan.

Pemilihan kepala daerah yang telah diadakan di Kabupaten Lampung Timur, adalah pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertujuan dapat membawa masyarakat Kabupaten Lampung Timur ke arah yang lebih demokratis.

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur diikuti oleh 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedua pasangan calon tersebut adalah: Pasangan nomor urut 1 (Yusran Amirullah dan Sudarsono) diusung oleh Partai Nasionalis Demokrat (NasDem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Golongan Karya (Golkar), sedangkan pasangan nomor urut 2 (Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari) diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.

Tabel 1: Hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yusran Amirullah - Sudarsono	232.455 (46,83%)
2	Chusnunia - Zaiful Bokhari	263.926 (53,17%)

Sumber: KPUD Lampung Timur Tahun 2016

Berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Timur hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, menetapkan pasangan Chusnunia Chalim-Zhaiful Bokhari sebagai pemenang pemilihan bupati 2015. Chusnunia-Zaiful meraih dukungan 263.962 suara (53,17%). Chusnunia-Zaiful telah menyingkirkan lawan pasangannya yang menjadi rival politiknya di Pilkada. Yusron Amirullah-Sudarsono meraih dukungan 232.455 suara (46,83%).

Tabel 2: Rekapitulasi data Hasil perolehan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur 2015 tiap kecamatan

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon		Total Perolehan Suara Sah
		Yusran Amirullah-Sudarsono	Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari	
1	Bandar Sribhawono	8.975	14.034	23.009
2	Batanghari	11.105	18.012	29.117
3	Batanghari Nuban	11.927	11.951	23.878
4	Braja Selehah	5.228	5.516	10.744
5	Bumi Agung	7.882	2.618	10.500
6	Gunung Pelindung	4.836	4.831	9.667
7	Jabung	11.536	12.188	23.724
8	Labuhan Maringgai	11.380	16.537	27.917
9	Labuhan Ratu	9.859	11.552	21.411
10	Marga Sekampung	8.265	6.063	14.328
11	Marga Tiga	11.968	10.884	22.852
12	Mataram Baru	5.987	7.077	13.064
13	Melinting	6.669	6.698	13.367
14	Metro Kibang	5.356	5.414	10.770
15	Pasir Sakti	7.181	9.440	16.621
16	Pekalongan	9.050	15.922	24.972
17	Purbolinggo	10.864	11.330	22.194
18	Raman Utara	6.798	12.437	19.235
19	Sekampung	13.939	19.734	33.673
20	Sekampung Udik	17.742	17.181	34.923
21	Sukadana	21.587	13.336	34.923
22	Waway Karya	6.321	12.586	18.907
23	Way Bungur	6.642	5.945	12.587

24	Way Jepara	11.358	12.640	23.998
	Total	232.455	263.926	496.381

Sumber: KPUD Lampung Timur 2016

Berdasarkan data rekapitulasi hasil perolehan suara tiap kecamatan, menunjukkan bahwa dari 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, sebanyak 17 kecamatan dimenangkan oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful. Sedangkan Pasangan Yusron-Sudarsono memperoleh dukungan suara lebih tinggi hanya di 7 kecamatan.

Pada pilkada kali ini, ada beberapa fenomena menarik yaitu keterwakilan perempuan pada tiap daerah untuk ikut mencalonkan diri maju ke pilkada. Para kader perempuan ini berani maju dalam pilkada baik melalui jalur independen maupun jalur partai politik (parpol). Calon perempuan yang menang sebagian besar adalah pendatang baru yang mengandalkan politik kekerabatan. Beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pilkada dengan salah satu pasangan calonnya perempuan yaitu Chusnunia Chalim sebagai calon Bupati Lampung Timur dan Erlina sebagai calon Wakil Bupati Pesisir Barat.

Hasil penelusuran data laman infopilkada.kpu.go.id, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan kandidat perempuan dalam pilkada serentak 2015 hanya 116 orang dari 1.584 peserta, atau 7,32 %. Dari 116 perempuan yang berlaga dalam pilkada, 54 mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 62 orang tercatat sebagai calon wakil kepala daerah.

Para perempuan tersebut tersebar di 90 daerah dari 262 daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Pada pilkada kabupaten, terdapat 76 orang dari 219 wilayah. Untuk pilkada kota 13 orang dari 34 wilayah, dan provinsi hanya 1 orang dari 9 wilayah.

Sedangkan berdasarkan wilayah partisipasinya, tercatat 79 orang mendaftar di tingkat kabupaten, 13 orang di tingkat kota, dan satu orang tingkat provinsi. Berdasarkan latar belakang perempuan yang ikut serta dalam pilkada, anggota DPR, DPD maupun DPRD merupakan yang terbanyak, 26 orang mendaftar sebagai kepala daerah (48,15 % dibandingkan kandidat pria), 20 orang sebagai wakil kepala daerah (32,36). Untuk perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik, 21 orang mendaftar sebagai kepala daerah (38,89 %), delapan orang sebagai wakil kepala daerah (12,90%).

Sementara perempuan yang berstatus petahana diketahui ada 19 orang kepala daerah (35,19 %), dan 1 orang wakil kepala daerah (1,62 %). Kandidat kepala daerah perempuan yang berstatus kader partai sebanyak 18 orang (33,3 %) dan 21 orang sebagai wakil kepala daerah (33,87 %). Kandidat kepala daerah perempuan berlatar belakang LSM atau ormas sebanyak 8 orang (14,81 %) sedangkan untuk wakil kepala daerah sembilan orang (14,52 %). (Sumber:<http://www.antarababel.com/berita/27544/kandidat-perempuan-dalam-pilkada-serentak>, diakses pada 23 Februari 2016 Pukul 16:32 WIB)

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan. Bahkan Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan.

Persentase perolehan suara yang didapat kandidat perempuan sangatlah minim pada pilkada sebelumnya, namun pada pilkada 2015 ini terdapat satu calon perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur yang maju dan tidak mempedulikan kekalahan kandidat perempuan yang ada sebelumnya. Eksistensi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan sudah tampak nyata di Kabupaten Lampung Timur. Pilkada ini tidak menutup kemungkinan peluang perempuan untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini.

Partisipasi perempuan dan politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun birokrasi pemerintahan, partai politik dan kehidupan publik lainnya. Bupati perempuan pertama di Lampung bahkan di Sumatera lahir dalam proses Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten Lampung Timur. Politisi muda Chusnunia Chalim berpasangan dengan Zaiful Bukhori berhasil mengungguli kandidat lainnya dalam kontestasi pilkada Lampung Timur.

Pencalonan perempuan sebagai kepala daerah di Lampung Timur pada tahun 2015 kali ini mendapatkan respon yang cukup positif, hal ini dibuktikan dengan kemenangan dan perolehan suara terbanyak di Lampung Timur pada pilkada tahun 2015 lalu.

Penelitian tentang pemilihan Kepala Daerah telah menjadi tema menarik dalam penelitian ini. Beberapa penelitian dapat dilihat dari kerangka teori, metodologi, dan hasil kesimpulan. Beberapa penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fitria Zainubi Eka P. (Universitas Lampung, 2016) dalam skripsi nya yang berjudul *Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masyarakat Desa Bungkok adalah keterbatasan eksistensi perempuan pada akses, partisipasi dan manfaat. Perempuan tidak meyakini dan dipercaya untuk menjadi pemimpin, termasuk mendukung dan memilih seperti pada pemilihan kepala daerah. Perempuan kurang memiliki akses pengembangan diri melalui pendidikan dan kegiatan masyarakat karena keterbatasan izin dari keluarga dan lingkungan. Masyarakat Desa Bungkok laki-laki maupun perempuan meyakini perempuan tidak mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

2. Monicha Anggraini (Universitas Lampung, 2015) dalam skripsinya berjudul *Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan Zainal Abidin (Incumbent) dan Anshori Djausal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara*.

Dalam hasil dan pembahasan penelitian meneliti kekalahan seorang *incumbent* yang memfokuskan perilaku pemilih dari pendekatan rasional, yaitu untung rugi melihat kinerja kandidat pada periode sebelumnya. Sedangkan perilaku pemilih menggunakan *punishment vote* (suara penghukuman) dalam memberikan suara kepada kandidat tersebut berdasarkan rasa kekecewaan masyarakat.

3. Mustiqa Maiwan Darman (Universitas Andalas) dalam skripsi nya yang berjudul *Identifikasi Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Terhadap Figur Calon Walikota Kota Padang Periode 2008-2013*.

Hasil dari penelitian ini adalah penganalisaan *Chi-Square* dan *Coeficient of Contingency*, peneliti menemukan bahwa agama adalah faktor dominan mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kota Padang terhadap figur calon walikota kota Padang mendatang, dengan nilai koefisien kontingensi kedua variabel adalah sebesar 0,415 yang berarti hubungan kedua variabel merupakan hubungan positif yang sedang. Sedangkan variabel kultur sosial masyarakat dan etnis tidak memiliki hubungan terhadap variabel figur calon Walikota Padang mendatang. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan, karena masih ada

variabel lain yang dapat dijadikan sebagai faktor dominan yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kota Padang terhadap figur calon walikota kota Padang mendatang.

Perbedaan dari beberapa skripsi di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menunjukkan bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari analisis SWOT. Dalam penelitian ini menggunakan teori pemahaman analisis SWOT karangan Ismail Solihin Tahun 2012 dan teori modalitas dalam kontestasi politik karangan Pierre Bourdieu Tahun 1986. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penelitian pustaka.

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Teori	Metodologi	Hasil/ Kesimpulan
1.	Fitria Zainubi Eka P.	Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur. (Universitas Lampung, 2016)	a. Tinjauan tentang budaya Patriarki b. Tinjauan tentang Perempuan dan Gender	Kualitatif Deskriptif	budaya patriarki masyarakat Desa Bungkok adalah keterbatasan eksistensi perempuan pada akses, partisipasi dan manfaat. Perempuan tidak meyakini dan dipercaya untuk menjadi pemimpin, termasuk mendukung dan memilih seperti pada pemilihan kepala daerah.
2.	Monicha Anggraini	Faktor Penyebab kekalahan Zainal Abidin (<i>incumbet</i>) dan	Perilaku pemilih	Deskriptif Kualitatif	1. Pemilih memberikan suara penghukuman kepada <i>incumbent</i>

		Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013. (Universitas Lampung, 2015)			dengan cara menjatuhkan pilihannya kepada orang lain. 2. Kepemimpinan yang buruk dari <i>incumbent</i> .
3.	Mustiqa Maiwan Darman	Identifikasi Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Terhadap Figur Calon Walikota Kota Padang Periode 2008-2013. Universitas Andalas	penganalisaan <i>Chi-Square</i> dan <i>Coeficient of Contingency</i> ,	Kualitatif	agama adalah faktor dominan mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kota Padang terhadap figur calon walikota kota Padang mendatang

Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2016

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur pada 9 Desember 2015 telah dimenangkan oleh ‘pendatang baru’ Pasangan Chusnunia-Zaiful. Pasangan Chusnunia-Zaiful memenangkan hasil akhir suara sebanyak 17 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada Di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan kejadian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, penulis akan menggunakan teori SWOT sebagai acuan penelitian. Teori SWOT yaitu kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), dimana kekalahan dan kemenangan kandidat biasanya disebabkan bagaimana strategi yang digunakan dalam memenangkan pilkada. Kemudian akan dipadukan dengan

modal sosial, modal ekonomi dan modal politik karena kekalahan dan kemenangan kandidat sangat di pengaruhi oleh tiga modal tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana Strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari analisis SWOT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari Analisis SWOT.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana dan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai strategi politik dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat dan politik, bahwa setiap pasangan calon kandidat memiliki strategi dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Modalitas dalam Kontestasi Politik

Pilkada merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Didalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pilkada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial

yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya, yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang *legitimate*. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai *prestise*, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang *legitimate*. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan 'versi dunia sosial yang resmi'.

Di dalam proses pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pilkada manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi didalam pilkada langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada tidak hanya menyesuaikan kondisi pilkada itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi.

Dalam penelitian ini merupakan fokus pada teori modal politik, modal sosial dan modal ekonomi sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pilkada. Berikut 3

(tiga) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pilkada langsung, sebagai berikut:

1. Modal Politik

Kandidat dalam pilkada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pilkada dan wakada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang.

Namun Pilkada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal

sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan.

Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar

politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan,

dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara. (Simon Philpott, 2003: 205)

Pemilihan kepala daerah merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol.

Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pilkada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat.

Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. (Haryanto, 2005: 72)

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim, dkk Elit politik dalam konteks lokal yaitu:

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”. (Nurhasim Moch dkk, 2003: 8)

Kandidat selain memerlukan dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan.

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

2. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan.

Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pilkada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati (2002) yang dapat dicermati sebagai berikut:

- a. Robert Putnam (1993): modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi

- dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/ jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).
- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban

- dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.
- d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan Lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.
- e. Modal sosial bagi Fukuyama (2002) adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

3. Modal Ekonomi

Dalam pilkada tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif

mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “*capital*” dengan arti: (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi adalah proses dimana preference individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Perspektif Ekonomi Politik Pilihan Publik, Didik J, Rachbini, 2002

Variabel	Perspektif Ekonomi	Perspektif Politik
Supplier	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Parpol, Birokrasi, Pemerintah
Demander	Konsumen	Pemilih (voters)
Jenis Barang	Barang Individu (<i>private goods</i>)	Barang Publik (<i>public goods</i>)
Alat Transaksi	Uang	Suara (<i>voters</i>)
Jenis Transaksi	Sukarela (<i>Voluntary Transaction</i>)	Suara (<i>voters</i>) <i>Politic as exchange</i>

Sumber: Didik J, Rachbini Tahun 2002

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik

uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- 1) Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pemilihan kepala daerah mengharuskan pasangan calon untuk menyeter dana sumbangan hingga miliaran rupiah.
- 2) Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
- 3) Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

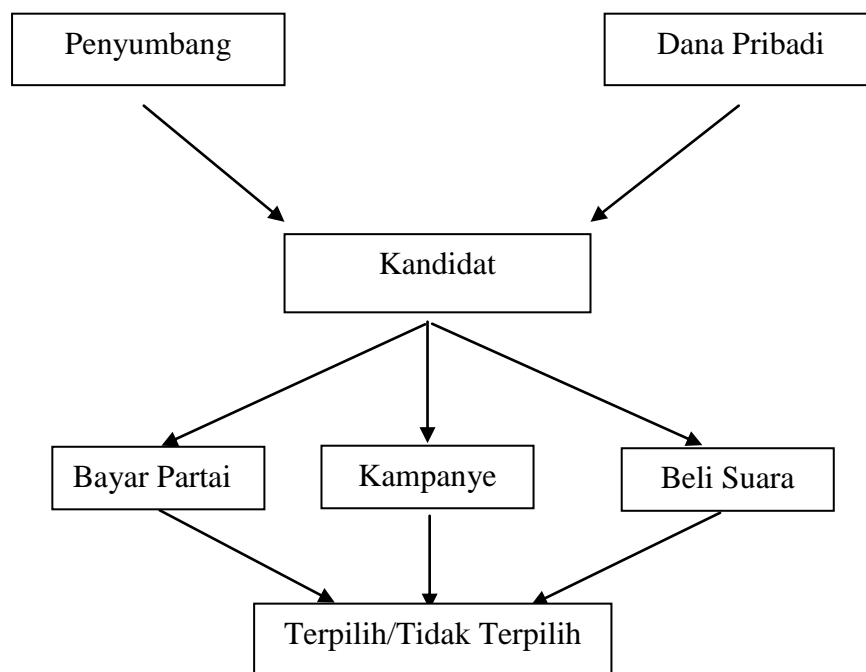
Ditambahkan Sahdan dan Haboddin (2009: 124-125), bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan kampanye. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu :

- 1) Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan kandidat dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga

bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan kandidat kepala daerah.

- 2) Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pemilihan kepala daerah penggunaan dana politik dilakukan oleh kandidat pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan, tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan kandidat untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Sahdan dan Haboddin (2009: 126) membuat alur bagaimana politik uang dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya :



Gambar 1. Bagan Dana Politik

Bagan di atas menunjukkan bahwa dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat.

Sehingga dapat disimpulkan modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dapat kemungkinan terjadi oleh pasangan calon Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

B. Konsep SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, dan Threats*)

Analisis SWOT digunakan dalam berfikir yang strategis. Berfikir strategis akan menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi. Berfikir strategis akan memudahkan bagi organisasi untuk menjalankan tindakan-tindakan strategis yang akan dilakukan. Berfikir strategis berkaitan dengan analisis SWOT yakni, penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang

atau ancaman. Analisis SWOT adalah analisis dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategi dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

SWOT adalah sebuah singkatan dari S adalah *Strenght* atau kekuatan, W adalah *Weakness* atau kelemahan, O adalah *Opportunity* atau kesempatan dan T adalah *Threat* atau Ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT hanya menggambarkan sesuatu yang terjadi bukan sebagai pemecahan masalah. (Solihin, 2012: 164)

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strenghts*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan

(*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strenghts*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. (Salusu, 1996: 376)

Sedangkan menurut Rangkuti (2006) menjelaskan Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal dan eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yaitu :

Tabel 5. Diagram matriks SWOT

EFAS / IFAS	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknes</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Thretats</i>)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindarkan ancaman

Sumber : Rangkuti Tahun 2006

IFAS (*internal strategic factory analysis summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis internal suatu organisasi disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal dalam kerangka *strenght and weakness*. Sedangkan EFAS (*eksternal strategic factory analysis summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal suatu organisasi disusun untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka *opportunities and threaths*. Pengidentifikasi terhadap isu-isu strategis suatu organisasi atau badan usaha, dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi atau setidaknya perwakilan dari semua level serta unit organisasi. Upaya pengidentifikasian ini disebut juga scanning dalam rangka menyusun corporate mapping. (Bryson, 2004)

Pada analisis SWOT dilakukan dua analisis, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal memiliki elemen yang berhubungan dengan produk organisasi, pelayanan, struktur, sumber daya (keuangan, tenaga kerja, teknologi, informasi prosedur, dan strategi yang dijalankan saat ini). Sedangkan analisis eksternal memiliki elemen lingkungan sosial yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan lingkungan tugas atau aktivitas yang meliputi kompetisi, produk baru atau proses, perubahan kekuatan atau kebutuhan. Untuk mendapatkan strategi yang tepat maka dilakukan penggabungan antara elemen internal dengan elemen eksternal, dan akan didapatkan empat alternatif strategi (Salusu, 1996: 366), yaitu sebagai berikut:

1. Strategi S dan O (Kekuatan dan Kesempatan)

Strategi SO, merupakan strategi yang paling murah karena dengan bekal yang paling sedikit dapat didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju atau mengandalkan kekuatan komparatif. Pendekatan yang digunakan pada strategi ini adalah utilitarian yang memaksimalkan utiliti atau tingkat institusi dari kekuatan dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan. Strategi ini disebut dengan strategi agresif.

2. Strategi S dan T (Kekuatan dan Ancaman)

Strategi ST, merupakan strategi yang agak mahal karena dengan bekal yang paling sedikit dapat diatasi ancaman yang sudah ada untuk maju sehingga harus dilakukan mobilisasi. Strategi ini menggunakan semi pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility institusi dari kekuatan, tetapi juga berhati-hati dalam menghadapi ancaman. Strategi ini disebut dengan strategi diversifikasi.

3. Strategi W dan O (Kelemahan dan Kesempatan)

Strategi WO, merupakan strategi investasi atau divestasi. Strategi ini juga agak sulit karena memihak pada kondisi yang paling lemah untuk menangkap peluang. Strategi ini disebut juga strategi dengan orientasi putar balik. Strategi ini menggunakan pendekatan pertumbuhan tetapi dari yang terlemah, dimana ada upaya institusi untuk mengutamakan pemerataan atau subsidi.

4. Strategi W dan T (Kelemahan dan Ancaman)

Strategi WT, merupakan strategi yang paling sulit karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah atau paling terancam. Pada strategi ini dilakukan pengontrolan kerusakan agar tidak menjadi lebih parah. Strategi ini menggunakan pendekatan pertahanan dimana ada upaya institusi untuk meminimalkan sesuatu yang membawa kerugian akibat adanya kelemahan dan ancaman.

Dari penjelasan teori SWOT di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman atau peluang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Teori SWOT menjelaskan apa saja peluang dan ancaman dipandang dari strategi yang digunakan. Sehingga menurut penulis teori ini relevan untuk digunakan bahwa kemenangan pasangan calon Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 disebabkan oleh bagaimana strategi yang digunakan.

C. Konsepsi Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015, pemilihan umum merupakan bagian dari penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Pemilihan umum menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menegaskan:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Di sisi yang lain menurut arti bahasa, pengertian dari Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dari pengertian pemilu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu merupakan suatu sarana atau cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam pemilu itu sendiri merupakan hak istimewa yang diperoleh oleh rakyat untuk menentukan para wakilnya yang dapat duduk di pemerintahan.

Sesuai dengan pengertian dari demokrasi, bahwa melalui pemilu ini rakyatlah yang berdaulat di suatu negara yang memilih wakilnya untuk duduk di parlemen, para wakilnya ini juga berasal dari rakyat dan misi dari wakil rakyat ini adalah mengelola negara untuk mensejahterakan rakyat yang bernaung di dalam negara tersebut, sehingga sejalan dengan arti demokrasi yang berbunyi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Masih menurut pengertian dari demokrasi tadi yang dihubungkan dengan pemilu sebagai suatu cara untuk menegakan demokrasi, dari sinilah banyak para ahli yang menyatakan bahwa pemilu yang berjalan dalam suatu negara merupakan inti dari demokrasi.

1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pada perspektif teoretis, dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu sistem yang selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian

tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process* dan *electoral law enforcement*. (Easton dalam Prihatmoko, 2005: 200)

Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah terukur (*measurable*).

Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Adapun dalam perspektif praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalensi tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Aktor utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; (3) penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan suara; dan (6) penetapan calon terpilih. Pilkada merupakan implementasi demokrasi partisipatoris dengan nilai-nilai demokrasinya menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut

diwujudkan melalui azas-azas pilkada yang terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 56 di ayat-ayatnya berbunyi :

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat (1). Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah:

- a. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.
- b. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

- d. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- e. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

Proses pelaksanaannya pemilihan kepala daerah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraannya dan bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57 ayat 1. Kemudian warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Disebut sebagai pemilihan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 68, tetapi pemilih haruslah memenuhi ketentuan atau syarat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 69 yang ayat-ayatnya berbunyi:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Seseorang warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi menemui syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Mengingat esensi pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah harus dilakukan pemilihan langsung.

Dimana secara prosedural dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, maka pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Dengan demikian jika demokrasi tidak bisa dijaga kedaulatannya maka akan berimbas buruk bagi masyarakat, khususnya negara. (Suharizal, 2011: 34)

Berdasarkan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015, pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pemilihan kepala daerah serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi pada berapa gelombang, didalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 disebutkan bahwa:

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan Desember 2015 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.
2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Febuari 2017 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan Juli s.d. Desember 2016 dan 2017.
3. Gelombang ketiga pemiihan serentak bulan Juni 2018, untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya 2018 dan 2019.

D. Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada hari pelaksanaan pemilihan agar pemilih menjatuhkan pilihan politiknya, maka dibutuhkan suatu strategi.

Dalam suatu pemilihan kepala daerah, masyarakat dihadapkan kepada pilihan-pilihan calon pemimpin yang disukainya, dengan demikian kompetensi diantara masing-masing calon pemimpin sangat kuat terjadi di pilkada. Selanjutnya upaya-upaya untuk memenangkan kompetisi tersebut

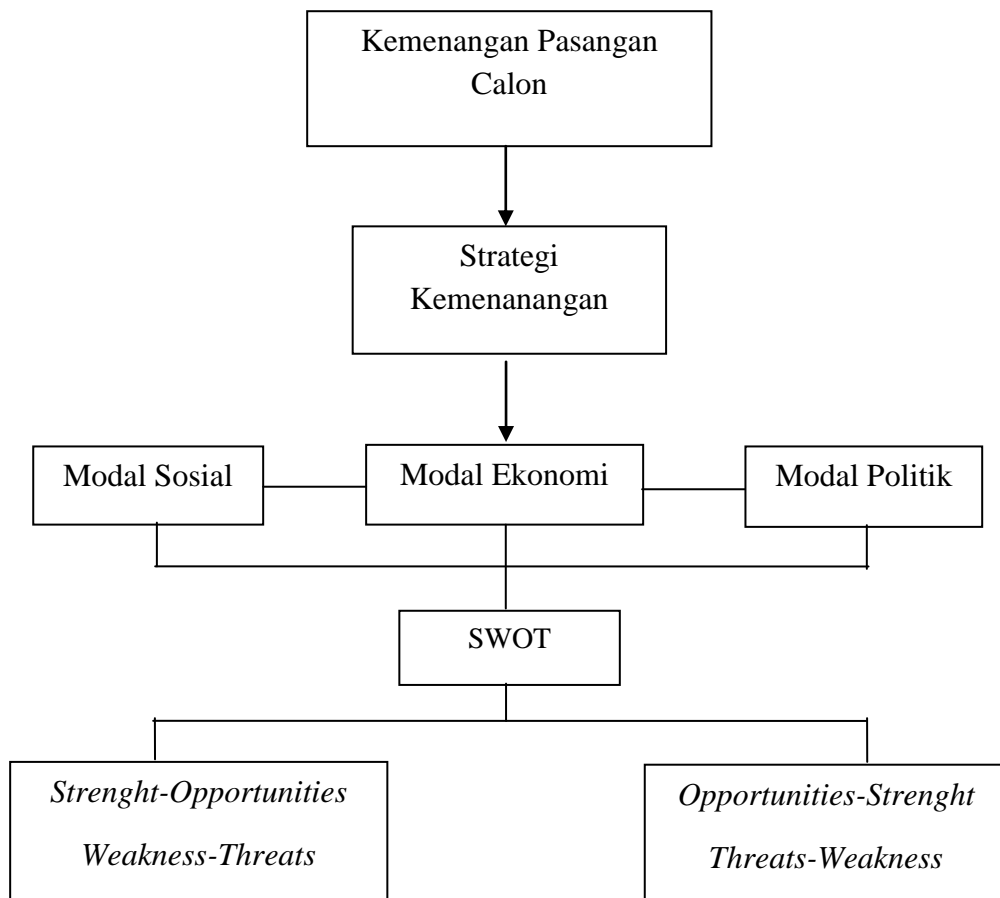
menjadi hal yang sangat signifikan dalam penentuan kemenangan bagi kandidat yang bertarung dalam arena politik tersebut.

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan alur pikir dalam bentuk kerangka pikir. Dimulai dari kemenangan Pasangan Chusnunia-Zaiful pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur secara langsung yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 silam. Pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Lampung Timur menghasilkan kemenangan mutlak oleh pasangan nomor urut dua (2) dengan hasil akhir suara 263.962 suara atau 53,17%.

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bagaimana pasangan calon Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari memenangkan hasil suara sebanyak 17 kecamatan dari 24 kecamatan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. Kemenangan dan kekalahan calon dapat dilihat dari bagaimana strategi SWOT. Maka penulis akan menggunakan teori SWOT, kemudian dipadukan dengan teori Modalitas dalam Kontestasi Politik (modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik).

Melalui proses deskripsi ilmiah tinjauan teoritik, maka penulis dapat menggambarkan skema alur pikir penelitian ke dalam kerangka penelitian secara gamblang, sekaligus memaparkan indikator yang akan dipergunakan, seperti di bawah ini:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian, fokus penelitian, proses, turun lapangan, analisis data, kesimpulan data hingga sampai dengan penulisannya tidak menggunakan *numerical measurement*, melainkan menggunakan proses pengukuran berbasis pengumpulan data konsep guna menemukan indikator, kemudian direfleksikan melalui proses deskripsi data yang interaktif. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini data yang di butuhkan adalah data holistik atau menyeluruh. Terkait bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat. (Bogdan dan Taylor, 1975: 27 dalam Moleong, 2000: 3)

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

“Data kualitatif sangat menarik. Ia merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dengan data kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat dan lagi, data kualitatif dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh lagi dari praduga dan kerangka kerja awal”. (Mathew B. Miles dan A. Mitchel Huberman, 1991: 1-2)

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini di gunakan karena terdapat relevansi yang kuat jika dipakai untuk menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian kualitatif ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang kemenangan Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat kualitatif, karena fokus penelitian akan membatasi masalah yang diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak meluas dan menjadi fokus

terhadap masalah penelitian sebenarnya yang diteliti. Fokus penelitian ini pada bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari analisis SWOT dan kemudian dikaji dari modal sosial, ekonomi dan politik. Adapun fokus penelitian, pada penelitian ini meliputi:

Tabel 6. Fokus penelitian dengan bentuk indikator dan sub-indikator kemenangan pasangan calon Chusnuia Chalim dan Zaiful Bokhari pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

No	Indikator	Sub-indikator	Sumber Informasi	
			Langsung	Tidak Langsung
1	Strategi S dan W (Kekuatan dan Kelemahan)	Kekuatan di bidang sosial, ekonomi, dan politik.	Hasil wawancara bersama LO pasangan calon (Chusnunia-Zaiful)	Media cetak, koran baik cetak maupun <i>online (e-paper)</i>
		Kelemahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik.		
2	Strategi O dan T (Peluang dan Ancaman)	Peluang di bidang sosial, ekonomi, dan politik.	Hasil wawancara bersama Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, Petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam, Tokoh Masyarakat	Media cetak, koran baik cetak maupun <i>online (e-paper)</i>
		Ancaman di bidang sosial, ekonomi, dan politik.		

Sumber: Data di olah oleh penulis Tahun 2016

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan peneliti dengan sengaja. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan memertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. (Moleong, 2001: 86)

Tempat atau lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Timur selama 3 bulan pada tanggal 3-14 September dan 6 November 2016. Dengan pertimbangan bahwa lokasi mudah dijangkau. Selain itu banyak proses mencari informasi dan juga pembelajaran di bidang politik yang dapat diambil manfaatnya.

Penulis memilih lokasi penelitian di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena ingin meneliti bagaimana strategi Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 ditinjau dari Analisis SWOT.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik

purposive dalam menentukan informan. *Purposive* adalah teknik penentuan informan berdasarkan wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, disamping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Alasan penulis mengguna *purposive* karena informan dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Penulis memfokuskan informan pada *LO* (tim pemenangan/ petugas penghubung) Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari, KPU Kabupaten Lampung Timur, Petugas Pengawas Kecamatan, Mahasiswa yang golput, tokoh masyarakat, jurnalis. Alasan memfokuskan pada informan tersebut karena mereka memiliki wawasan dan paham fenomena terhadap tujuan penelitian. Berikut tabel informan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Basuki	Anggota tim kampanye Pasangan Chusnunia-Zaiful
2.	Andri Oktavia	Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
3.	M. Toyib	Petugas Panwascam Kecamatan Sekampung Udik Divisi Organisasi dan SDM
4.	Yayuk Sulan Utami	Mahasiswa (Pemilih yang tidak memilih Pasangan Chusnunia-Zaiful)
5.	Veri Susiandi	Jurnalis
6.	Nur Fuad	Tokoh Masyarakat (Ketua Majelis Wakil Cabang) NU Kecamatan Sekampung Udik

Sumber: Data diolah oleh Penulis Tahun 2016

E. Jenis Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. (Loftland dan Loftland, 1984: 47). Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2012: 225)

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasar pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data.

Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta observasi langsung oleh peneliti. Saat menetapkan informan, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian. Oleh

sebab itu, unit analisis dalam mengidentifikasi strategi Pasangan Chusnunia-Zaiful dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 adalah:

- a. Pihak LO (*liasion official*) atau Tim Pemenangan pasangan calon.
- b. anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, Petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Mahasiswa yang tidak memilih Pasangan Chusnunia-Zaiful, Jurnalis dan Tokoh Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya, misalnya memvalidasi data hasil wawancara. Data-data tersebut dapat bersumber dari dokumentasi berupa majalah, surat kabar, buku arsip, situs dan sumber-sumber yang dapat diterima.

Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder ini berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup undangundang dan peraturan terkait, serta referensi-referensi yang menjadi panduan.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka data sekunder yang akan digunakan peneliti adalah dengan mencari informasi melalui koran ataupun majalah baik cetak ataupun online yang secara regular melaporkan bagaimana keadaan pemerintahan, kondisi ekonomi, di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, dokumen terkait hasil survey

popularitas dan elektabilitas Pasangan Chusnunia-Zaiful di Kabupaten Lampung Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat bagi penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dari obyek yang akan diteliti tersebut. Proses wawancara tersebut dibantu dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis baik berupa dokumen, arsip, buku, buletin, maupun literatur tertulis lainnya yang selaras serta mendukung penyelesaian penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun dalam

penelitian ini, peneliti mencari atau menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian adalah:

- a. Dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara dari KPU Kabupaten Lampung Timur.
- b. Dokumen hasil survey popularitas elektabilitas pasangan calon Chusnunia-Zaiful di Kabupaten Lampung Timur.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi:

1. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut. Tahap *Editing* yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. (Moleong, 2006: 151)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh informan atau sumber data lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistis yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. (Noor, 2011: 163)

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2013: 88). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mengacu dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Memilih data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data kedua dengan menyusun data dalam satuan yang sejenis. (Sugiyono, 2013: 92)
2. Menampilkan Data
Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun dalam pola sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, dengan menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. (Sugiyono, 2013: 95)
3. Verifikasi Data
Kegiatan yang ketiga adalah verifikasi data. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan validitasnya.
4. Dalam menyimpulkan hasil analisis ini mengacu pada perspektif emik dan etik. Perspektif etik mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasifikasi dan fitur-fiturnya menurut temuan pengamat atau peneliti (*scientist's viewpoint*). Sementara emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam memelajari dan

memberi makna terhadap satu tindakan, atau membedakan dua tindakan (*native's viewpoint*). Perspektif emik adalah struktural yang berarti cara anggota kelompok budaya memandang dunianya, jadi melihat dan memandang dari sisi dirinya. Perspektif etik, sebaliknya merupakan interpretasi pengalaman-pengalaman budaya. (Moleong, 2013: 236)

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

1. Orientasi Wilayah

Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825).

Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: $105^{\circ}15'$ BT- $106^{\circ}20'$ BT dan $4^{\circ}37'$ LS - $5^{\circ}37'$ LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih $5.325,03 \text{ KM}^2$ atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung (total wilayah Lampung seluas 35.376 KM^2). Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Dari segi topografi Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi menjadi lima daerah yaitu pertama, daerah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Jabung, Sukadana, Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai. Kedua, daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, dengan kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 50 meter sampai 200 meter dpl.

Penduduk Kabupaten Lampung Timur di Tahun 2011 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebanyak 961.971 jiwa, dengan sex ratio sebesar 105,55. Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 181 jiwa/km², dengan ketimpangan masih cukup tinggi antar kecamatannya. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalongan yaitu sebesar 456 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way

Bungur yaitu sebesar 59 jiwa/km². Hal ini menunjukkan masih tidak meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Lampung Timur.

Penduduk usia kerja Kabupaten Lampung Timur di tahun 2011 sebanyak 689.768 jiwa. Sebesar 68,36 % penduduk usia kerja di kabupaten ini merupakan angkatan kerja, dan 95,79 % berstatus bekerja. Sektor pertanian yang masih menjadi sektor paling diminati penduduk Kabupaten Lampung Timur. Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Timur yang terdaftar sedang mencari pekerjaan memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Sebesar 59,99% (1.210 jiwa) pencari kerja di Lampung Timur hanya lulusan SLTA.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun ajaran 2011/2012 sudah ada hingga level SMA/sederajat. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 81,29 % diantaranya merupakan SD negeri. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hanya 26,49 % dari total sekolah SMP yang ada. Hanya 6,71 % dari total Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada merupakan SMA Negeri.

Fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten ini antara lain rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah bersalin, klinik kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di tahun 2011 belum memadai terutama pada profesi dokter spesialis yang tidak ada di kabupaten ini. Bidan merupakan tenaga kesehatan terbanyak, terdapat 486 bidan di kabupaten ini yang tersebar di tiap kecamatan.

Mobilitas masyarakat Kabupaten Lampung Timur ditunjang dengan sarana perhubungan darat dan laut. Sarana perhubungan darat pada Tahun 2011 terdiri dari 128,12 km jalan Negara, 204,60 km jalan provinsi, dan 1221,84 km jalan kabupaten. Dari total jalan tersebut yaitu sepanjang 1554,56 km, 27,55 % dalam kondisi baik, 25,36% dalam kondisi sedang, 38,21% dalam kondisi rusak ringan, dan 8,88% dalam kondisi rusak berat.

Kabupaten Lampung Timur memiliki 5 pelabuhan, yaitu pelabuhan Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih, Way Seputih, dan Way Sekampung. Kelima pelabuhan ini melakukan bongkar muat ikan dan muat es balok. Pelabuhan Labuhan Maringgai dan Way Penet berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Kuala Seputih dan Way Seputih berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, dan Pelabuhan Way Sekampung berlokasi di Lampung Selatan.

Secara administratif, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat Pemerintahan di Kota Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 Kecamatan definitif, 13 Kecamatan Pembantu dan 232 Desa, selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik setatusnya di tingkatkan menjadi Kecamatan Definitif, dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua)

kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan 11(sebelas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga di kecamatan Kabupaten Lampung Timur sekarang berjumlah 23 kecamatan definitif dan 232 desa. Dengan Keputusan Bupati 232 definitif dan desa persiapan.

Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No 19 Tahun 2001 dan No 06 Tahun 2002 maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan desa persiapan. Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 desember 2003 tentang perubahan status dan desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga. sedangkan sekarang jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 241, yang terdiri dari 227 desa definitif, 5 Kelurahan, 9 desa persiapan.

Adapun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yaitu:

1. Sukadana
2. Labuhan Maringgai
3. Jabung
4. Batang Hari
5. Sekampung
6. Pekalongan
7. Way Jepara
8. Purbolinggo
9. Raman Utara

10. Metro Kibang
11. Marga Tiga
12. Sekampung Udik
13. Batang Hari Nuban
14. Bumi Nabung
15. Bandar Sribawono
16. Mataram Baru
17. Melinting
18. Gunung Pelindung
19. Pasir Sakti
20. Waway Karya
21. Labuhan Ratu
22. Labuhan Ratu
23. Way Bungur
24. Marga Sekampung

2. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Timur

a. Zaman Pemerintahan Belanda

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman Pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang di kepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya di Bantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi / Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, Yaitu:

1. Onder Distrik Sukadana
2. Onder Distrik Labuan Maringgai
3. Onder Distrik Gunung Sugih

Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir pesirah.

Tabel 8: Onder Distrik berdasarkan dari marga-marga.

No.	Onder Distrik Sukadana	Onder Distrik Labuhan Maringgai	Onder Distrik Gunung Sugih
1	Marga Sekampung	Marga Melinting	Marga Unyi
2	Marga Tiga	Marga Sekampung Ilir	Marga Subing
3	Marga Nuban	Marga Sekampung Udik	Marga Anak Tuha
4	Marga Unyai Way Seputih	Marga Sekampung Labuhan	Marga Pubian

(Sumber: Website Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)

b. Zaman Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Pemerintahan Jepang merupakan wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi dalam beberapa Bun Shu, Marga-marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang, Bun Shu Cho dan Bun Shu Cho. Marga di kepalai oleh marga Cho, dan kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.

c. Zaman Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga 1948. itulah sebabnya ditinjau dari perkembangan organisasi Pemerintahan maka pembagian Wilayah Lampung atas Kabupaten-Kabupaten dianggap terjadi pada zaman Pemerintahan Jepang.

Kejadian-Kejadian yang perlu dicatat pada tahun 1946 s/d 1947 jumlah Marga bertambah 2 Marga yaitu :

1. Marga Terusan Unyai
2. Marga Selagai Lingga

Tambahan Marga ini terjadi karena adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.

d. Masa Pemerintahan Negeri (1953 s/d 1975)

Dengan dibubarkannya Pemerintah Marga sebagai gantinya dibentuk pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala kampung, pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu :

1. Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan
2. Negeri Tribawono dengan pusat Pemerintahan Di Banar joyo
3. Negeri Sekampung dengan pusat Pemerintahan di Sumbergede
4. Negeri Sukadana dengan pusat Pemerintahan di Sukadana
5. Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat Pemerintahan di lahubahn maringgai.

Dalam Praktek Sistem Pemerintahan Negeri tersebut di rasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadanya ini menyulitkan Tugas Pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mulai tahun 1972

mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di bagian timur maka dibentuk wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Jabung, Labuhan maringgai, Way Jepara, Sukadana, Pekalongan, Raman Utara dan Purbolinggo.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II.

Pada tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah Wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan Definitif dan 13 (tiga belas)

Kecamatan Pembantu. (Sumber: <http://lampungtimurkab.go.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2016, Pukul 14:58)

B. Profil Pasangan Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari

1. Chusnunia Chalim

Chusnunia adalah anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Chusnunia merupakan jebolan IAIN Wali Songo Semarang. Wanita kelahiran Karang Anom iki merupakan sosok yang aktif di bidang politik. Dia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2003), Ketua Divisi Eksternal Komite Independen Pemantau pemilu Jawa Tengah (2003-2004), Staf Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah dan masih banyak lagi.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dia sering terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Misalnya saat peringatan hari HIV. Dia menilai bahwa kampanye penggunaan kondom yang dilakukan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai gebrakan awal di masa jabatannya dinilai tidak pantas. Pasalnya, Menkes semestinya fokus kepada program-program yang masih berjalan. Terkait upaya penanggulangan penyakit HIV-AIDS, menurut dia kementerian Kesehatan masih memiliki sejumlah cara sehingga tidak hanya mengkampanyekan kondom sebagai program unggulan.

Dia juga pernah walkout rapat komisi IX DPR saat membahas merk susu berbakteri pada 2011. Dia merasa gemas dengan sikap keras Pemerintah maupun Institut Pertanian Bogor (IPB) yang keukeuh tak mau membuka informasi tersebut secara terbuka. Bagi Chusnunia, selain dapat membuat masyarakat kembali tenang, tindakan pemerintah untuk mengumumkan merk susu berbakteri itu mesti dilakukan. Soalnya hal itu sudah menjadi putusan tetap dari Mahkamah Agung yang harus di taati.

Dia ingin mengimbau dan menyentuh hati dari pemerintah maupun IPB, agar segera mempublikasikan informasi susu berbakteri yang telah meracuni generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai pemerintah dituding sebagai pihak yang tega meracuni generasi penerus bangsa ini. (Sumber: <http://profil.merdeka.com/indonesia/c/chusnunia/>, diakses pada Tanggal 11 September 2016, pukul 14:29 WIB)

Pasangan yang diusung PKB dan Partai Demokrat itu meraih suara 53,17%. Sementara pesaingnya Yusran Amirullah-Sudarsono meraih 46,83% suara. Di Kabupaten Lampung Timur, pilkada hanya diikuti dua pasang calon ini. Semula, ada tiga pasangan yang ditetapkan KPU setempat sebagai calon kepala daerah dan wakilnya. Namun, pada masa kampanye, Prio Budi Utomo, calon wakil bupati yang menjadi tandem Erwin Arifin, meninggal dunia. KPU Lampung Timur pun menggururkan pencalonan Erwin Arifin, bupati sebelumnya.

Pada pilkada 2010, Erwin maju digandeng Satono sebagai wakil bupati. Belakangan, Satono tersandung kasus korupsi dan buron hingga sekarang. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri melantik Erwin Arifin sebagai bupati menggantikan Satono hingga habis masa jabatan.

Kembali ke Chusnunia, pemenang pilkada 2015 versi hitung cepat. Dari delapan daerah di Lampung yang mengelat pilkada, ia satu-satunya calon kepala daerah perempuan. Ia masih terbilang belia. Lahir di Karang Anom 12 Juli 1982, kini perempuan yang akrab disapa Nunik tersebut baru berusia 33 tahun. Bagi warga Bandar Lampung, atau Lampung pada umumnya, namanya mungkin relatif kurang dikenal. Tapi di Lampung Timur dan Senayan (komplek DPR RI), alumnus Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang ini, bukan sosok asing.

Ayahnya, almarhum Kiai Chalim, adalah ulama senior di Lampung Timur. Nunik bisa disebut politikus muda yang sedang bersinar. Ia anggota DPR RI dua periode dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2009-2014 dan 2014-2019. Pertama menjadi anggota DPR RI dalam usia 27 tahun. Pada periode kedua, Nunik melenggang ke Senayan setelah menangkan 56.752 suara dari Dapil Lampung II, termasuk Lampung Timur di dalamnya. Bersama Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainuddin dari Dapil Lampung I, ada dua wakil PKB Bumi Ruwa Jurai di DPR RI periode 2014-2019.

Pada masa kerja 2014-2019, Nunik bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Di PKB, Nunik dikenal dekat dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pemegang gear master dari Jurusan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta ini merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB 2009-2014. Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Bendahara Umum PKB Erman Soeparno pada 2007-2008. Seiring pencalonannya sebagai bupati Lampung Timur pada September 2015, Nunik mengundurkan diri dari DPR RI. (Sumber: <http://duajurai.com/2015/12/profil-chusnunia-chalim-pemenang-pilkada-lampung-timur-versi-quick-count/>, diakses pada tanggal 11 September 2016, Pukul 14:32 WIB)

2. Zaiful Bokhari

Zaiful Bokhari adalah calon Wakil Bupati Lampung Timur yang mendampingi Chusnunia Chalim. Zaiful Bokhari memiliki berbagai pengalaman di dunia pekerjaan diantaranya yaitu sebagai Direktur Utama di PT. BUMI SARI KENCANA pada Tahun 1996-2008, kemudian pada Tahun 2001-2007 menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. JAYA INDAH UTAMA. Pada Tahun 2009-2014 Zaiful Bokhari mulai berani masuk ke dunia politik yaitu menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan di periode selanjutnya pada Tahun 2014-2019.

Pengalaman organisasi Zaiful Bokhari yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua BPC GAPENSI Tanggamus periode 1996-1999
- b. Wakil Sekertaris BPD ARDIN Provinsi Lampung periode 2004-2008
- c. Ketua ASPEKINDO Lampung Timur periode 2003-2008
- d. Wakil Sekertaris FKPM Lampung Timur periode 2001-2009
- e. Sekertaris DPC Partai Demokrat periode 2006-2008
- f. Ketua DPC Partai Demokrat periode 2006-2016
- g. Ketua KSI Lampung Timur periode 2012-2016

Adapun visi Pasangan Chusnunia-Zaiful adalah “Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang aman, mandiri, sejahtera, berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian berbasis agribisnis/ pertanian berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang berpihak kepada kepentingan rakyat”.

Sementara misi yang akan dijalankan oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- c. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- d. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. Profil Pasangan Yusron Amirullah dan Sudarsono

1. Yusron Amirullah

Yusron Amirullah lahir di Bumi Tinggi, pada 24 September 1964 yang memiliki berbagai pengalaman pekerjaan yaitu pernah menjadi karyawan swasta di PT. GMP Lampung Tengah, kemudian menjabat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur periode 2009-2014 sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur periode 2014-2019.

Pengalaman Yusron di bidang organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua SIAN Kabupaten Lampung Timur periode 2008-2013
- b. Ketua RAPI Kabupaten Lampung Timur periode 2009-Sekarang
- c. Ketua Paku Banten Lampung Timur periode 2009-Sekarang
- d. Ketua IMI Korwil Lampung Timur periode 2013-Sekarang
- e. Ketua Partai Karya Perjuangan Lampung Timur 2011-2014
- f. Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Lampung Timur 2013-2018

2. Sudarsono

Nama Lengkap Drs. Sudarsono, M.Si, lahir di Tambah Dadi pada tanggal 13 Februari 1961. Sudarsono mempunyai banyak pengalaman di dunia pekerjaan seperti pernah menjadi guru di SDN 1 Tambah Luhur Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1982-1995, selanjutnya menjadi Kepala Sekolah di SDN 1 Tanjung Inten Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1995-2004. Pada Tahun 2005-2007 Sudarsono menjabat menjadi KACABDIN Dinas Pendidikan Dasar, selanjutnya di tahun yang sama menjadi IRBAN II di Inspektorat Lampung Timur.

Sudarsono menjabat menjadi Kabid Perlindungan Anak di Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2007-2008, Kemudian di tahun selanjutnya menjadi Kepala Dinas di institusi yang sama. Pada Tahun 2009-2010, Sudarsono menjabat menjadi Kepala Badan di BKDD Kabupaten Lampung Timur, di tahun selanjutnya menjadi Kepala Dinas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur. Sudarsono pernah menjabat menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Sekretariat PEMKAB Lampung Timur periode 2014-Sekarang.

Adapun pengalaman organisasi Sudarsono yaitu sebagai berikut:

- a. Sekertaris Cabang Pramuka periode 2003-2013
- b. Sekertaris Cabang PATRI periode 2004-Sekarang
- c. Wakil Ketua PUJASUMA periode 2006-Sekarang

d. Ketua PEPADI periode 2014-Sekarang.

Visi Pasangan Yusron-Sudarsono adalah “Terwujudnya Kabupaten Lampung Timur yang Aman, Damai, Sejahtera, Maju dan Mandiri”.

Sementara Visi yang akan dijalankan oleh Pasangan Yusron-Sudarsono adalah sebagai berikut:

- a. Membangun perekonomian berbasis pertanian dan kelautan;
- b. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah;
- c. Memacu Perkembangan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Mendorong pembangunan industri lokal;
- e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- f. Menciptakan Pemerintahan yang Aman, Damai, dan Berwibawa.

D. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur telah digelar pada Tanggal 9 Desember 2015 lalu. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur diikuti oleh 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedua pasangan calon tersebut adalah: Pasangan nomor urut 1 (Yusran Amirullah-Sudarsono) diusung oleh Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Golkar, pasangan nomor urut 2 (Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari) diusung oleh Partai Keadilan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.

Tabel 9: Hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yusran Amirullah - Sudarsono	232.455 (46,83%)
2	Chusnunia - Zaiful Bokhari	263.926 (53,17%)

Sumber: KPUD Lampung Timur Tahun 2016

Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Timur hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, menetapkan pasangan Chusnunia Chalim-Zhaiful Bokhari sebagai pemenang pemilihan bupati 2015. Chusnunia-Zaiful meraih dukungan 263.962 suara (53,17%). Chusnunia-Zaiful telah menyingkirkan lawan pasangannya yang menjadi rival politiknya di Pilkada. Yusron Amirullah-Sudarsono meraih dukungan 232.455 suara (46,83%).

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab V, dapat disimpulkan bahwa pada pilkada 2015 ini terdapat satu calon perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur yang maju dan tidak mempedulikan kekalahan kandidat perempuan yang ada sebelumnya. Eksistensi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan sudah tampak nyata di Kabupaten Lampung Timur dan modal sosial merupakan kekuatan paling dominan dan sangat penting dalam strategi memenangkan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*) yang dimiliki oleh Pasangan Chusununia dan Zaiful Bokhari adalah memiliki kekuatan dari modal sosial dengan dikenal masyarakat lampung timur sebagai sosok yang sederhana dan memiliki sosialisasi yang tinggi terhadap masyarakatnya. Selain itu, dengan berlatar belakang dari kalangan santri dan merupakan keturunan dari kiyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, hal ini merupakan modal sosial yang menjadi kekuatan terbesar dari Chununia Chalim untuk menarik simpatik di kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu dari segi ekonomi, Pasangan Chusnunia-Zaiful tidak begitu mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan kegiatan kampanye. Pasangan Chusnunia-Zaiful juga memiliki banyak pengalaman politik menjadikan mereka mempunyai kekuatan politik untuk dapat mendominasi basis dukungannya.

2. Kelemahan (*Weakness*): Kelemahan yang dialami oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful terletak pada indikator sosial bahwa masalah gender yaitu beberapa masyarakat Kabupaten Lampung Timur masih ragu akan memilihnya Chusnunia Chalim sebagai calon bupati pertama sebagai perempuan.

Minimnya modal ekonomi yang dimiliki pasangan ini menjadikan sulitnya untuk dapat menggunakan sebagai belanja alat-alat kampanye, hal ini berbanding terbalik apa yang dimiliki lawannya yaitu Pasangan Yusron-Sudarsono, pasangan tersebut mempunyai modal ekonomi yang lebih dibandingkan dengan Pasangan Chusnunia-Zaiful.

Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful tidak memiliki konsultan politik untuk dapat merancang strategi kampanye, Tim pemenangan mengaku bahwa mereka lah yang menjadi konsultan politik tersebut, mereka melaksanakan kampanye dengan cara *trial and error*.

3. Peluang (*Opportunities*): Pasangan Chusnunia-Zaiful memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kelompok ibu-ibu pengajian (Fatayat), dan Gerakan Pemuda Ansor. Di bidang ekonomi, pasangan ini memanfaatkan bantuan dana (donatur) dari para simpatisan.

Di bidang politik, dengan diusungnya dua partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat dan bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadikan pasangan ini lebih yakin untuk dapat memenangkan pilkada, terlebih lagi partai ini merupakan partai besar yang mendominasi wilayah Lampung timur setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

4. Ancaman (*Threats*): Ancaman dari aspek sosial yang dihadapi oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful adalah bahwa lawan kandidatnya yaitu Pasangan Yusron-Amirullah sudah memiliki jaringan hingga ke tingkat desa, para kepala desa di beberapa kecamatan sudah siap mendukung pasangan tersebut untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

Ancaman dari aspek ekonomi yang dihadapi oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful adalah bahwa pasangan tersebut tidak begitu memiliki dana kampanye yang besar dibandingkan lawannya yaitu Pasangan Yusron-Amirullah, sehingga Pasangan tersebut sudah lebih siap dan matang untuk melakukan kegiatan kampanye untuk mencetak brosur, poster, juga

untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Ancaman lain yang dihadapi oleh Pasangan Chusnunia-Zaiful dari aspek politik yaitu bahwa banyaknya dukungan partai politik yang dimiliki lawannya yaitu Pasangan Yusron-Sudarsono. Sebanyak 8 (Delapan) partai politik yang diantaranya 3 partai pengusung dan 5 partai pendukung siap mendukung untuk dapat memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

B. Saran

1. Optimalisasi peran partai politik pada proses kaderisasi dengan memperbanyak kuota perempuan sehingga representasi perempuan dalam dunia politik lebih dominan. Selain itu partai politik harus menciptakan pola kaderisasi bagi perempuan lebih mengutamakan kualitas dan kompetensi sehingga kader perempuan dalam partai politik mampu bersaing dengan laki-laki.
2. Penulis menyarankan kepada pasangan calon untuk dapat melakukan persiapan kampanye dengan matang dan menyeluruh ke semua wilayah agar semua masyarakat lebih kenal dan paham siapa calon yang akan dipilih pada pemilihan kepala daerah. Tim pemenangan lebih siap dalam melaksanakan kegiatan kampanye, dimulai dari kesiapan nya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat menarik simpatik dan persiapan modal ekonomi yang lebih besar untuk dana kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bryson, John M. 2004. *Strategic Planning for Public and NonProfit Organization*. Jossey-Buss. San Fransisco
- Budiharjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Easton dalam Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, hal. 200. Jakarta.
- Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), 2002, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam : Yogyakarta.
- Ginancar. 2005. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Gordon, Sanford C, dan Dimitri, Landa. 2009. *Do The Advanteges Of Incumbency, Advantage Incumbent?*, The Journal of Politics, Vol. 71, No. 4. pp. 1481–1498.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar)*, JIP UGM, Yogyakarta
- Johnson, Dennis. 2001 W. *How Political Consultants are Reshaping American Democracy: No Place for Amateurs*, New York: Routledge.
- Lotfland dan Lotfland. 1984. *The Method of Qualitative Research*. Institute of South Asian Studies. London.
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mathew B. Miles dan A. Mitchel Huberman. 1991. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

- Mefi Hermawanti. 2002. *“Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat”*, Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur, IRE Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja.
- Noor, 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nurhasim, Moch, dkk, 2003, *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.
- Philpott, Simon, 2003. *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, Yogyakarta: LkiS.
- Prihatmoko, JokoJ. ,2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (editor), 2009, *Evaluasi Kritis PenyelenggaraanPilkada Di Indonesia*, IPD, Yogyakarta
- Salusu, J., (1996), *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-profit*, PT. Gramedia. Jakarta.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung Alfabeta.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sumber Web:

<https://pilkada2015.kpu.go.id/>, diakses pada 23 Februari 2016 Pukul 16:56 WIB

<https://pilkada2015.kpu.go.id/lampungtimurkab>, diakses pada 23 Februari 2016 Pukul 17:28 WIB

<http://www.antarababel.com/berita/27544/kandidat-perempuan-dalam-pilkada-serentak>, diakses pada 23 Februari 2016 Pukul 16:32 WIB)

Sudirman Nasir. 2009. *SBY antara modal politik dan modal simbolik*, dalam <http://pemilu.liputan6.com/kolom>. diakses 18 April 2016 Pukul 16:38 WIB

<http://lampungtimurkab.go.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2016, Pukul 14:58

<http://duajurai.com/2015/12/profil-chusnunia-chalim-pemenang-pilkada-lampung-timur-versi-quick-count/>, diakses pada tanggal 11 September 2016, Pukul 14:32 WIB)

<http://lampung.antaranews.com/berita/286651/pdiperjuangan-siap-dukung-pencalonan-chusnunia-chalim>, diakses pada Tanggal 12 Okt. 2016, Pukul 12:33 WIB)

Dokumen:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DB- KWK. KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Model BB.2-KWK. KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, Model LADK, LPSDK, LPPDK-PARPOL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Skripsi

Fitria Zainubi Eka P. *Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Lampung, 2016

Monicha Anggraini. *Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan Zainal Abidin (Incumbent) dan Anshori Djausal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara*. Universitas Lampung, 2015

M. Dias Al Kaisya, 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Incumbent Edy Sutrisno Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2010*. thesis, Universitas Lampung.